

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anwar Usman dan AM. Mujahidin dalam Makalah “*Whistleblower dalam perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 14.

Diyah Candrawati dan Damar Juniarto. 2009. *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Eddyono, Supriyadi Widodo. 2011. *Perlindungan (Jurnal Saksi dan Korban)*. Jakarta: Humas, Diseminasi, dan Hukum LPSK.

_____, dkk. 2005. *Kasus-Kasus Perlindungan Saksi*. Jakarta: ELSAM.

Garner, Bryan A (Editor in Chief). 2007. *Black's Law Dictionary – eighth edition*, USA.

Hadar, Ivana. 2005. *Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Kompas.

Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsi Watapone.

Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.

- _____. 2010. *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*. Jakarta: PPATK.
- Ilias Chtzis, dkk dan UNODC. 2010. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan*. Jakarta: LPSK.
- Ilias & Tim UNODC. 2010. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir – Cetakan I*. Jakarta: LPSK, 2010.
- Ivan Yustiavandana, dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamil, Iskandar. 2008. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Kanter. E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 2002. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2011. *Perlindungan (Jurnal Saksi dan Korban) Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* Jakarta: Bidang Humas, Diseminasi, dan Humas LPSK.
- Maharani Siti Shopia. 2011. *Perlindungan (Jurnal Saksi dan Korban)*. Jakarta: Humas, Diseminasi, dan Hukum LPSK.
- M. Arief Mansur, Dikdik & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realitas)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nasution, Bismar. 2005. *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa Tahun 2011. 2012. Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas LPSK.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Semendawai, Abdul Haris. 2011. *Memahami Whistle Blower*. Jakarta: Humas, Diseminasi, dan Hukum LPSK, 2011
- _____. 2011. *Jurnal Perlindungan (Jurnal Saksi dan Korban)*. Jakarta: Humas, Diseminasi, dan Hukum LPSK.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Ferry Aries. 2010. *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gramata Publication.
- Syarif Fadillah dan Chaeruddin. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi*. Jakarta: Ghalia Press.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan (Rutan) Negara.

PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

PP No. 23 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

PP No. 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (BAB II tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan).

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Internet

[http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/05/04/m3hy0u-lpsk-mundur-jika-kpk-jadikan-angie-justice-collaborator-perlindungan-pada-angie\)](http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/05/04/m3hy0u-lpsk-mundur-jika-kpk-jadikan-angie-justice-collaborator-perlindungan-pada-angie) diunduh pada tanggal 16 September 2012 pukul 20.00.

Muhammad Yusuf. Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi. (Tulisan Pakar) <http://Parlemen.net>. 31/08/2005. page 1, diunduh pada tanggal 18 Oktober 2012, pukul 15.00.

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/21/41660/melindungi_para_whistleblower/#.T23HR11luho, diunduh pada tanggal 5 Oktober 2012, pukul 16.14.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/05/17/ahirnya-whistleblower-dan-justice-collaborator-bukti-lemahnya-kemenkumham-jaksa-agung-polri-dan-kpk/> diunduh pada tanggal 5 Oktober 2012, pukul 16.20.

www.google.com/jurnal_natamihardja_perlindungan-saksi-pdf, diunduh pada 6 Oktober 2012, pukul 22.38.

Vaughn, Robert G. 1989. Whistleblower Protection Laws (1989), <http://www.enotes.com/major-actscongress/whistleblower-protection-laws>, diunduh pada 20 November, pukul 14.50.

Naskah Akademis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. 2007. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Naskah Akademis Trafficking – Perdagangan Manusia. 2007. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.